



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRABAYU**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA**
3. NHK : **811712**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 13.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 9.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 2.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/250 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 860.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CHR HYBRID Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 82.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.842.283.300
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	17.484.283.300
III. HUTANG	Rp.	196.864.692
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.287.418.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.